

PEMROV SULTRA ANGGARKAN RP1,5 MILIAR PERAWATAN TUGU PERSATUAN KENDARI DI 2025



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun 2025 menganggarkan sebesar Rp1,5 miliar untuk perawatan dan kebersihan kawasan tugu persatuan di Kota Kendari. "Kalau anggaran perawatan tugu persatuan di tahun 2024 ini hanya sekitar Rp200 juta, maka di tahun 2025 kita naikkan menjadi Rp1,5 miliar dan itu sudah disetujui DPRD Sultra," kata Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto disela-sela melakukan bersih-bersih dengan ratusan ASN Pemprov Sultra di kawasan tugu (eks MTQ) Kota Kendari, Jumat.

Menurut Pj Gubernur, ada dua Icon di Kota Kendari yang kini jadi perhatian masyarakat di Bumi Anoa Sultra. Yang pertama Tugu Persatuan dan Masjid Al-Alam di Teluk Kendari. Khusus tugu persatuan, lanjut Andap, dibangun Pemprov Sultra 20 tahun lalu hingga kini belum pernah mendapat anggaran perawatan dan kebersihan, padahal kawasan itu sudah menjadi pusat kegiatan masyarakat seperti olahraga santai dan wisata kuliner lainnya. "Saya harap kepada masyarakat di Kota Kendari, jadikan kawasan tugu persatuan ini sebagai milik kita bersama, yang tentunya bila sudah jadi milik berarti perawatan dan kebersihan tentu akan selalu terjaga," ujar Pj Gubernur didampingi Ketua DPRD Sultra La Ode Tariaala dan Sekda Sultra Asrun Lio saat mendampingi. Di bagian lain, mantan Sekjen KemenkumHam RI yang kini menjabat sebagai Staf Khusus KemenHum Bidang Politik dan Hukum itu mengatakan, menjelang akhir tahun 2024

yakni perayaan Natal dan tahun Baru 2025, mari bersama-sama menjaga keamanan daerah. "Silahkan bagi warga masyarakat yang merayakan Natal dan tahun baru dengan tetap menjaga kebersamaan dan kekompakan, dan saling menghargai antar umat beragama secara damai dan aman," ujarnya.

Khusus kepada ASN lingkup Pemprov Sultra, Andap juga mengingatkan arahan bapak Menteri Dalam Negeri yang sangat mendasar agar seluruh pejabat aparatur sipil negara menghindari perilaku korupsi. "Saya kira teman-teman ASN sudah mengetahui beberapa pejabat daerah di tanah air terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK seperti Pejabat di Bengkulu dan Pj Walikota Pekanbaru bersama sejumlah pejabat lainnya," ujar Andap. Dengan kasus OTT itu dapat menjadi perhatian bagi seluruh pejabat ASN di Sultra untuk dapat menghindarinya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/485398/pemprov-sultra-anggarkan-rp15-miliar-perawatan-tugu-persatuan-kendari-di-2025>, "Pemprov Sultra anggarkan Rp1,5 miliar perawatan tugu persatuan Kendari di 2025", 06 Desember 2024
2. https://sultra.tribunnews.com/2024/12/06/pemprov-sulawesi-tenggara-alokasikan-rp15-miliar-untuk-pemeliharaan-kawasan-eks-mtq-kendari#google_vignette, "Pemprov Sulawesi Tenggara Alokasikan Rp1,5 Miliar untuk Pemeliharaan Kawasan Eks MTQ Kendari", 06 Desember 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 - b. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah;
 - c. Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
 - d. Pasal 90 ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam Menyusun RKA SKPD;

- e. Pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui Bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.